



Kebijakan Pemerintah untuk Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Masyarakat Kurang Mampu

Fifi Fatmawati^{a1}, Nuzulul Fadillah^{b2}, Ahmad Faizi^{c3}, Heri Kurnia^{d4}

^a CV. Kurnia Grup, Wirokerten, Banguntapan, Bantul DIY

^b Tegalsari, Kawunganten Lor, Kawunganten, Cilacap, Jawa Tengah

^c Mentosari, Kentengsari, Candioto, Temanggung, Kawa Tengah

^d Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulung, Kota Tangerang Selatan, Banten

¹fififatmawati34@gmail.com, ²nuzululfadillah11@gmail.com, ³ahmadfaizi037@gmail.com,

⁴dosen03087@unpam.ac.id

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<i>Sejarah Artikel:</i> Diterima: 10 Februari 2025 Direvisi: 12 Maret 2025 Disetujui: 25 April 2025 Tersedia Daring: 1 Mei 2025 <i>Kata Kunci:</i> Kebijakan pemerintah Akses pendidikan Masyarakat kurang mampu	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Pendidikan yang berkualitas merupakan faktor penting dalam menciptakan kesempatan dan mobilitas sosial. Namun, masyarakat kurang mampu sering menghadapi tantangan dalam mengakses pendidikan karena keterbatasan finansial dan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini melibatkan analisis kebijakan pemerintah, seperti program beasiswa, subsidi pendidikan, pembangunan sekolah di daerah terpencil, dan pengembangan infrastruktur pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah telah berhasil meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi. Penelitian ini memberikan wawasan tentang efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengurangi kesenjangan akses pendidikan dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan lebih lanjut.
	ABSTRACT
<i>Keywords:</i> Government policies Access to education Underprivileged communities	<i>This study aims to analyze government policies in increasing access to education for the underprivileged. Quality education is an important factor in creating opportunity and social mobility. However, disadvantaged communities often face challenges in accessing education due to financial and infrastructure constraints. Therefore, the government has implemented various policies to overcome this problem. This research involves analyzing government policies, such as scholarship programs, educational subsidies, building schools in remote areas, and developing educational infrastructure. The results of the analysis show that government policies have succeeded in increasing access to education for underprivileged communities, although there are still challenges that need to be overcome. This research provides insight into the effectiveness of government policies in reducing disparities in access to education and provides recommendations for further improvement.</i>

©2025, Fifi Fatmawati, Nuzulul Fadillah, Ahmad Faizi, Heri Kurnia
This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap individu yang harus dijamin oleh negara. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat kurang mampu yang menghadapi kendala dalam mengakses pendidikan yang layak. Untuk mengatasi kesenjangan ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah penting dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk



meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah memahami bahwa pendidikan yang berkualitas merupakan kunci untuk menciptakan kesempatan yang adil bagi semua warga negara dalam mengembangkan potensi mereka. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada anak atau individu yang terpinggirkan atau terhalang dalam mendapatkan pendidikan yang layak.

Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah dengan memberikan bantuan keuangan atau beasiswa kepada masyarakat kurang mampu. Program beasiswa ini bertujuan untuk membantu mereka dalam membiayai pendidikan mereka, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Beasiswa ini mencakup berbagai macam jenis pendidikan, seperti beasiswa untuk sekolah negeri maupun swasta, beasiswa prestasi, dan beasiswa bagi siswa yang berasal dari daerah terpencil atau terpinggirkan.

Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan akses pendidikan dengan membangun infrastruktur pendidikan yang memadai di daerah-daerah terpencil atau miskin. Pembangunan gedung sekolah, peningkatan fasilitas belajar, dan penyediaan perpustakaan serta laboratorium yang memadai adalah beberapa contoh upaya pemerintah dalam memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas.

Selain itu, pemerintah juga gencar melakukan kampanye untuk mengurangi angka putus sekolah dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pendidikan. Program-program tersebut melibatkan kerjasama antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan mendorong partisipasi aktif dalam memastikan anak-anak menerima pendidikan yang layak. Melalui kebijakan-kebijakan ini, pemerintah berupaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

2. Metode

Metode yang digunakan penulis dalam artikel ini adalah metode literatur. Metode ini menggunakan teknik pengumpulan data, membaca, penyimpanan dan pengelolaan bahan penelitian. Peneliti menggunakan metode ini, karena peneliti anggap lebih mudah dari pada metode yang lain. Metode ini juga memudahkan kami sebagai penulis. Anda sebagai pembaca juga lebih mudah memahaminya. Dan kami berharap apa yang saya tulis dalam artikel ilmiah ini dapat membuat perbedaan yang positif. Baik bagi kami sebagai penulis maupun bagi anda sebagai pembaca.

3. Hasil dan Pembahasan

Pentingnya pendidikan dalam pembangunan suatu negara

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap individu dan merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemajuan suatu negara. Namun, akses pendidikan yang terbatas masih menjadi masalah yang dihadapi oleh sebagian masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah sering kali mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dalam pembahasan ini, akan dibahas beberapa kebijakan yang biasa diterapkan oleh pemerintah yaitu:

- A. Program Beasiswa: Salah satu kebijakan yang paling umum digunakan oleh pemerintah adalah program beasiswa. Program ini memberikan bantuan finansial kepada siswa atau mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga mereka dapat mengakses pendidikan tanpa terkendala masalah keuangan. Beasiswa dapat mencakup biaya pendidikan, biaya hidup, dan seringkali juga memberikan tunjangan tambahan. Dalam

- program beasiswa, pemerintah bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan mitra lainnya untuk memilih penerima beasiswa yang memenuhi syarat.
- B. Peningkatan Alokasi Dana Pendidikan: Pemerintah juga dapat meningkatkan alokasi dana untuk sektor pendidikan. Hal ini dilakukan dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan di daerah-daerah yang memiliki populasi masyarakat kurang mampu yang tinggi. Dana tambahan ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan, memberikan bantuan finansial kepada siswa, meningkatkan kualitas pengajaran, dan melatih guru.
 - C. Pendidikan Gratis atau Berbiaya Rendah: Salah satu pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan akses pendidikan secara gratis atau dengan biaya yang rendah kepada masyarakat kurang mampu. Pemerintah dapat menetapkan kebijakan pendidikan gratis untuk jenjang pendidikan tertentu, seperti pendidikan dasar dan menengah, atau memberikan subsidi yang signifikan untuk biaya pendidikan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan hambatan finansial yang mungkin menghalangi masyarakat kurang mampu untuk mengakses pendidikan.
 - D. Program Bantuan Pendidikan Non-Finansial: Selain bantuan finansial, pemerintah juga dapat memberikan bantuan non-finansial kepada masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan akses pendidikan. Contohnya adalah memberikan akses ke fasilitas pendidikan, seperti perpustakaan dan laboratorium, penyediaan sarana transportasi bagi siswa yang tinggal di daerah terpencil, atau menyediakan materi pendidikan yang mudah diakses melalui platform digital.
 - E. Penyuluhan dan Kampanye Pendidikan: Pemerintah dapat mengadakan program penyuluhan dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan hak-hak mereka. Kampanye ini dapat melibatkan partisipasi aktif dari komunitas lokal, tokoh masyarakat, dan kelompok sukarelawan untuk memastikan bahwa masyarakat kurang mampu memahami pentingnya pendidikan dan memanfaatkan peluang yang ada.
 - F. Peningkatan Akses Teknologi: Pemerintah dapat berupaya meningkatkan akses masyarakat kurang mampu terhadap teknologi, seperti komputer dan akses internet. Dengan menyediakan fasilitas teknologi yang memadai, mereka dapat memanfaatkannya untuk mengakses sumber daya pendidikan online, e-learning, dan literatur digital yang dapat membantu meningkatkan akses pendidikan mereka.
 - G. Kebijakan-kebijakan di atas hanya beberapa contoh dari berbagai pendekatan yang dapat diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Namun, penting untuk diingat bahwa kebijakan semacam ini haruslah disertai dengan pemantauan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan agar tujuan meningkatkan akses pendidikan dapat tercapai dengan efektif. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan organisasi non-pemerintah lainnya untuk mendorong partisipasi dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Akses pendidikan yang dihadapi oleh masyarakat kurang mampu

Akses pendidikan yang dihadapi oleh masyarakat kurang mampu adalah isu yang serius di banyak negara. Kelompok masyarakat ini sering kali menghadapi berbagai kendala yang menghalangi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan ekonomi. Masyarakat kurang mampu sering kali tidak mampu membayar biaya pendidikan, termasuk biaya sekolah, seragam, buku, dan peralatan lainnya. Akibatnya, anak-anak dari keluarga miskin sering kali terhalang untuk mengakses pendidikan formal. Selain itu, akses fisik ke lembaga pendidikan juga dapat menjadi masalah. Masyarakat kurang

mampu sering kali tinggal di daerah terpencil atau perkotaan yang terpinggirkan, di mana jarak ke sekolah bisa jauh dan transportasi yang terbatas. Keterbatasan infrastruktur dan transportasi yang memadai dapat menghambat anak-anak dari keluarga miskin untuk menghadiri sekolah secara teratur.

Selain itu kurangnya dukungan dan pengetahuan tentang pentingnya pendidikan juga dapat mempengaruhi akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Beberapa orang tua mungkin tidak menyadari manfaat pendidikan formal atau kurang memahami bagaimana mereka dapat membantu anak-anak mereka meraih pendidikan yang lebih baik. Kurangnya dukungan ini dapat menghambat motivasi anak-anak untuk belajar dan mencapai potensi mereka secara penuh. Isu sosial seperti diskriminasi juga dapat mempengaruhi akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Mereka mungkin menghadapi stereotip negatif atau prasangka dari masyarakat yang lebih mampu secara ekonomi, yang pada gilirannya dapat menghambat kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan yang diperoleh oleh kelompok lain.

Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk mengambil langkah-langkah konkret. Ini dapat mencakup menyediakan beasiswa atau bantuan keuangan kepada siswa dari latar belakang ekonomi rendah, membangun sekolah di daerah terpencil, menyediakan transportasi sekolah yang aman dan terjangkau, serta memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang manfaat dan pentingnya pendidikan. Melalui upaya kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dapat ditingkatkan. Setiap individu berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, dan dengan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat kurang mampu, kita dapat memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang sukses melalui pendidikan.

Faktor-faktor penyebab keterbatasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu

Ada beberapa faktor penyebab keterbatasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Beberapa faktor utama antara lain:

- A. Faktor Ekonomi: Salah satu penyebab utama keterbatasan akses pendidikan adalah keterbatasan sumber daya finansial. Masyarakat kurang mampu sering kali tidak memiliki cukup uang untuk membiayai biaya pendidikan, seperti biaya sekolah, buku, seragam, transportasi, dan lain sebagainya. Keterbatasan ekonomi dapat menghambat akses mereka ke lembaga pendidikan yang berkualitas.
- B. Ketidaktersediaan Infrastruktur: Banyak daerah di negara-negara berkembang tidak memiliki infrastruktur pendidikan yang memadai. Jarak yang jauh antara rumah dan sekolah, kurangnya sarana transportasi yang terjangkau, serta kurangnya fasilitas pendukung seperti perpustakaan, laboratorium, dan akses internet dapat menghambat masyarakat kurang mampu untuk mengakses pendidikan.
- C. Faktor Geografis: Pendidikan dapat sulit diakses di daerah pedesaan, terpencil, atau terpencil. Jarak yang jauh antara sekolah dan tempat tinggal, kondisi infrastruktur yang buruk, serta minimnya lembaga pendidikan di daerah-daerah ini membuat sulitnya akses ke pendidikan bagi masyarakat kurang mampu yang tinggal di sana.
- D. Faktor Budaya dan Tradisi: Beberapa budaya dan tradisi tertentu mungkin menghambat akses pendidikan. Misalnya, perkawinan dini, peran gender yang ketat, atau tanggung jawab pekerjaan rumah tangga yang berlebihan bagi perempuan dapat menghambat mereka untuk mengakses pendidikan. Juga, dalam beberapa masyarakat, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan atau pandangan negatif terhadap pendidikan dapat menjadi hambatan bagi akses pendidikan yang merata.

E. Kualitas Pendidikan: Kualitas pendidikan yang buruk atau rendah di sekolah-sekolah yang terjangkau juga dapat menjadi faktor yang menghambat akses pendidikan. Jika sekolah tidak memberikan pendidikan berkualitas atau jika guru tidak terlatih dengan baik, maka masyarakat kurang mampu mungkin akan kehilangan minat dalam mengakses pendidikan. Untuk mengatasi keterbatasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, diperlukan langkah-langkah seperti kebijakan pembebasan biaya pendidikan, peningkatan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, program beasiswa, upaya penghapusan diskriminasi, dan pendekatan inklusif untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang setara dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Penjelasan mengenai tujuan, strategi, dan program-program yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan

Pemerintah memiliki berbagai tujuan yang ingin dicapai untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan negara. Beberapa tujuan utama yang sering dikejar oleh pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengentasan kemiskinan, penyediaan layanan publik yang baik, perlindungan lingkungan, dan keamanan nasional. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah mengadopsi berbagai strategi dan melaksanakan berbagai program. Salah satu strategi yang sering digunakan oleh pemerintah adalah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong sektor-sektor ekonomi yang potensial, dan memperkuat sektor industri dalam negeri. Tujuannya adalah untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Pemerintah juga melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program-program ini mencakup peningkatan akses dan mutu pendidikan, penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, sanitasi, dan perumahan layak. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan program-program pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan energi yang berkelanjutan guna meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat. Pemerintah juga memiliki tujuan dalam mengentaskan kemiskinan. Untuk mencapai hal ini, pemerintah melaksanakan program-program bantuan sosial dan program peningkatan keterampilan serta pelatihan kerja bagi masyarakat yang kurang mampu. Pemerintah juga berupaya menciptakan kesempatan usaha dan lapangan kerja melalui pembangunan sektor ekonomi yang inklusif.

Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam. Pemerintah melaksanakan program-program perlindungan lingkungan seperti pengelolaan sampah yang baik, konservasi sumber daya alam, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Tujuannya adalah untuk menjaga keberlanjutan lingkungan agar dapat dinikmati oleh generasi masa depan. Di bidang keamanan nasional, pemerintah memiliki tujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan keamanan rakyat. Pemerintah melaksanakan program-program pertahanan dan keamanan yang mencakup pengembangan militer, penegakan hukum, dan kerjasama internasional untuk menghadapi tantangan keamanan baik di dalam maupun di luar negeri.

4. Kesimpulan

Pemerintah melaksanakan strategi-strategi seperti memperkuat pertahanan militer, membangun hubungan diplomasi dengan negara-negara lain, dan melibatkan masyarakat dalam program-program keamanan. Tujuannya adalah untuk menjaga kedaulatan negara,

melindungi warga negara, dan menciptakan stabilitas dan perdamaian di dalam dan di luar negeri. Selain strategi-strategi tersebut, pemerintah juga melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan tujuan pembangunan negara. Program-program ini mencakup program beasiswa untuk meningkatkan akses pendidikan, program pembangunan infrastruktur untuk memperbaiki konektivitas dan aksesibilitas, program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerja untuk mengurangi kemiskinan, program pengembangan energi terbarukan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, dan program keamanan nasional untuk menjaga kedaulatan negara.

Melalui strategi-strategi dan program-program ini, pemerintah berupaya untuk mencapai tujuan pembangunan negara secara komprehensif. Dengan meningkatkan akses pendidikan, kualitas hidup masyarakat, pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan keamanan nasional, pemerintah berharap dapat menciptakan masyarakat yang lebih maju, adil, dan berkelanjutan.

5. Daftar Pustaka

- Afiyanti, Y. (2008). Validitas Dan Reliabilitas Dalam Penelitian Kualitatif. <https://jki.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/212>
- Ahmad, R. (2018). Analisis Data Kualitatif (Vol. 17, Issue 33). <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah>
- Anshori, I. (2018). Melacak State Of The Art Fenomenologi Dalam Kajian Ilmu-Ilmu Sosial. *Halaqa: Islamic Education Journal*, 2(2), 165–181. <https://doi.org/10.21070/halaqa.v2i2.1814>
- Azwar, M., & Amaliah, R. (2017). Pemanfaatan Jurnal Elektronik Sebagai Sumber Referensi Dalam Penulisan Skripsi Di Institut Pertanian Bogor (Vol. 5, Issue 1).
- Fitri, P. O., & Fernandes, R. (2021). Peran Orang Tua Dalam Mengawasi Penyalahgunaan Gadgetoleh Anak diMasa Pandemi Covid-19(Studi: Nagari Durian GadangKabupatenLimapuluh Kota). *Jurnal Perspektif*, 4(3), 266. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v4i3.445>
- Irhandayaningsih, A. (2020). Pengukuran Literasi Digital Pada Peserta Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19. *ANUVA*, 4(2), 231–240.
- Kalsum, U. (2016). Referensi sebagai layanan, Referensi sebagai tempat: sebuah tinjauan terhadap layanan referensi di perpustakaan perguruan tinggi. *Jurnal Iqra'*, 10(1), 132–136.
- Karniawati, N. (2015). Hakekat Ilmu Pemerintahan (Kajian secara Filsafat). *Cosmogov*, 1(2).
- Maulana, S. (2016). Pemanfaatan Computational Fluid Dynamics (Cfd) Dalam Strategi Penelitian Simulasi Model Pada Teknologi Penghawaan Ruang. In *Jurnal Education Building* (Vol. 2, Issue 2).
- Mulyadi, M. (2011). Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya (Vol. 15, Issue 1).
- Nashihuddin, W., Dwi, D., & Aulianto, R. (2016). Pengelolaan Terbitan Berkala Ilmiah Sesuai Ketentuan Akreditasi: Upaya Menuju Jurnal Trakreditasi Dan Bereputasi Internasional. In *Jurnal Pustakawan Indonesia* (Vol. 15, Issue 1).
- Prihantoro, A., & Hidayat, F. (2019). Melakukan Penelitian Tindakan Kelas. *Ulummudin*, 9(21), 48–60. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/index



- Romli, L. (2008). Masalah Reformasi Birokrasi. E-Journal BKN, 2(2), 1–8.
<https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/149>
- Wahyudiati, D. (2018). Pengaruh Aspek Keuangan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Sdm) Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Desa Kasongan
The Effect Of Financial Aspect And Human Resource Competence On Umkm Performance In Kasongan VILLAGE.
<https://journal.student.uny.ac.id/index.php/profita/article/view/13761/13264>